



RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 41);
 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3)
 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 22);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub-kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau semi output dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub-kegiatan adalah serangkaian aktivitas pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran (*output*).
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
28. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021;

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil pelaksanaan musrenbang forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021 mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2020



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU.....	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 & Capaian Renstra Bappeda	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	14
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda....	23
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA.....	49
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	52
	3.3 Program dan Kegiatan	53
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA.....	67
BAB V	PENUTUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2019 Kota Payakumbuh	6
Tabel 2.2	Kinerja Pelayanan Bappeda	22
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021	25
Tabel 3.1	Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2021	50
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kota Payakumbuh	54
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kota Payakumbuh (Program/Kegiatan Sesuai Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022).....	68
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kota Payakumbuh (Program/Kegiatan Hasil Pemetaan Sesuai Permendagri No.90 Tahun 2020).....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan. Sedangkan untuk Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai perwujudan perencanaan tahunan.

Penyusunan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja Bappeda Kota Payakumbuh meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja Bappeda. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja Bappeda, orientasi mengenai RKPD dan Renja Bappeda, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Bappeda mengacu pada Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bappeda yang definitif.

Penyusunan rancangan Renja Bappeda dalam prosesnya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Bappeda saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 26);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 85);

20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan renja dimaksudkan untuk pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Renja Bappeda Kota Payakumbuh adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan; dan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2021 adalah sebagai :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Bappeda Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu & Capaian Renstra Bappeda
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Bappeda

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan pertimbangan untuk pelaksanaannya pada tahun berikutnya, serta kemungkinan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2019 Kota Payakumbuh

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
4.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			23,262,868,481		4,952,097,515		3,635,298,061		3,513,140,580		8,453,152,355		36.34%
4.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			20,388,631,628	-	4,952,097,515		3,226,023,861		3,124,764,620		8,064,776,395		39.56%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89.00	6,764,444,054	80,00	1,852,674,215	81.00	1,660,768,539	81.22	1,580,516,118	81.22	3,433,190,333	100.27%	50.75%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 1800 lembar, cek giro 60 buku, paket pengiriman 90 kg	15,852,067	Benda pos 600 lembar, cek giro 20 buku, paket pengiriman 30 Kg	4,559,100	Benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 Kg	2,387,000	Benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 Kg	2,209,500	Benda pos 900 lembar, cek giro 30 buku, paket pengiriman 45 Kg	6,768,600	50%	42.70%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	24 rekening, 72 bulan	720,037,163	8 rekening, 24 bulan	121,261,381	4 rekening, 12 bulan	75,970,566	4 rekening, 12 bulan	61,225,745	12 rekening, 36 bulan	182,487,126	50%	25.34%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	142 unit	35,695,375	48 unit	10,930,200	27 unit	6,720,000	27 unit	6,694,300	75 unit	17,624,500	50%	49.37%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	84 orang	2,462,310,011	28 orang	448,755,120	14 orang	362,264,000	14 orang	320,834,000	42 orang	769,589,120	50%	31.25%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	102 jenis, 12 orang	384,699,143	34 jenis, 4 orang	114,968,721	17 jenis, 2 orang	62,836,800	17 jenis, 2 orang	60,003,764	51 jenis, 6 orang	174,972,485	50%	45.48%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	336 unit	119,611,051	102 unit	33,846,000	56 unit	18,011,000	56 unit	17,370,000	158 unit	51,216,000	50%	42.82%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	354 unit	186,545,187	59 jenis	44,980,000	59 jenis	30,360,896	59 jenis	30,276,000	59 jenis	75,256,000	50%	40.34%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	48 jenis, 300.000 lembar, 1200 buku	127,000,913	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	38,770,615	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	25,793,872	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	25,563,300	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	64,333,915	50%	50.66%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	47,179,600	2 jenis	20,415,400	2 jenis	25,600,000	2 jenis	25,338,500	2 jenis	45,753,900	50%	96.98%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diadakan	8 unit	194,000,000	14 unit	176,902,340	6 unit	82,500,000	6 unit	82,478,000	6 unit	259,380,340	50%	133.70%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	21.600 eksemplar; 288 buku	140,257,920	7.200 eksemplar: 96 buku	41,865,000	3.600 eksemplar: 48 buku	21,120,000	3.600 eksemplar: 48 buku	20,995,000	10.800 eksemplar: 144 buku	62,860,000	50%	44.82%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	3.444 porsi; 5.802 porsi; 378 galon	105,793,130	1.148 porsi, 1.934 porsi, 126 galon	31,444,240	574 porsi, 967 porsi, 63 galon	15,931,000	574 porsi, 967 porsi, 63 galon	13,189,420	1.722 porsi, 2.901 porsi, 189 galon	44,633,660	50%	42.19%
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	240 kali; 150 kali	2,053,813,034	80 kali, 50 kali	712,714,583	40 kali, 25 kali	902,830,201	40 kali, 25 kali	886,502,769	120 kali, 75 kali	1,599,217,352	50%	77.87%
	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	10 orang	171,649,459	2 orang	51,261,515	1 orang	28,443,204	1 orang	27,835,820	3 orang	79,097,335	50%	46.08%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	1,197,676,436	80,00%	264,014,352	80,00%	258,647,540	80,00%	251,348,631	80,00%	515,362,983	80,00%	43.03%
	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 set slinger & 5 unit AC	48,500,000	3 unit AC	13,497,000	2 paket	25,000,000	2 paket	24,593,000	3 unit AC dan 2 paket	38,090,000	50%	78.54%
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	26 unit	110,900,000	4 unit	13,860,000	2 set	48,000,000	2 set	47,960,000	4 unit dan 2 set	61,820,000	50%	55.74%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	1,038,276,436	42 kendaraan roda dua; 8 unit kendaraan roda empat	236,657,352	23 kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	129,647,540	23 kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	122,819,631	65 kendaraan roda dua; 12 unit kendaraan roda empat	359,476,983	50%	34.62%
	Rehab sedang/berat gedung kantor	Luas kantor yang direhab	1 unit pojok Asi dan 1 unit ruang perpustakaan	235,000,000	-	-	2 paket	56,000,000	2 paket	55,976,000	2 paket	55,976,000	50%	23.82%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			4	5	6	7	8 = 5 + 7	9 = 8/4 x 100%						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	122,400,000	100%	36,891,800	100%	18,000,000	100%	17,996,000	100%	54,887,800	100%	44.84%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	272 stel	122,400,000	84 stel	36,891,800	40 stel	18,000,000	40 stel	17,996,000	124 stel	54,887,800	50%	44.84%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 orang	257,886,373	3 orang	26,079,938	3 orang	26,840,724	3 orang	26,493,900	9 orang	52,573,838	1	20.39%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	18 orang	257,886,373	6 orang	26,079,938	3 orang	26,840,724	3 orang	26,493,900	9 orang	52,573,838	50%	20.39%
5	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		A	161,703,750	BB	34,480,120	A	12,417,500	A	12,396,360	A	46,876,480	A	28.99%
	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan SKPD yang disusun	36 laporan	79,781,500	6 Laporan	18,980,120	6 laporan	5,737,500	6 laporan	5,723,000	12 laporan	24,703,120	50%	30.96%
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan publik	Indeks kepuasan konsumen	24 Dokumen	81,922,250	4 dokumen	15,500,000	4 dokumen	6,680,000	4 dokumen	6,673,360	8 dokumen	22,173,360	50%	27.07%
6	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	95.00%	1,312,674,780	80,00%	249,626,381	80,00%	87,437,010	80,00%	84,893,997	80,00%	329,656,138	80,00%	25.11%
	Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	12 dokumen	631,488,606	4 dokumen	174,181,881	1 dokumen	7,146,700	1 dokumen	6,675,500	5 dokumen	180,857,381	50%	28.64%
	Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	5 dokumen	506,778,044	2 dokumen	75,444,500	1 dokumen	75,394,450	1 dokumen	73,354,257	3 dokumen	148,798,757	50%	29.36%
	Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	10 bidang	174,408,130			10 bidang	4,895,860	10 bidang	4,864,240	10 bidang	4,864,240	50%	2.79%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
7	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	90%	475,165,066	90%	150,792,611	90%	8,128,000	90%	8,013,700	90%	158,806,311	90%	33.42%
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang dibuat	- 4 kali; - 3 MOU	475,165,066	- 12 kali; - 6 MOU	150,792,611	- 6 kali; - 3 MOU	8,128,000	- 6 kali; - 3 MOU	8,013,700	18 kali; - 9 MOU	158,806,311	50%	33.42%
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	470,405,421	100%	75,917,767	100%	9,480,225	100%	8,472,950	100%	84,390,717	100%	17.94%
	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	30 kali	229,704,312	10 kali	75,917,767	4 kali	5,377,475	4 kali	4,465,450	14 kali	80,383,217	50%	34.99%
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	32 SKPD, 16 kali, 20 kali, 8 kali, 100%	240,701,109	-	-	4 kali	4,102,750	4 kali	4,007,500	4 kali	4,007,500	50%	1.66%
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	100%	875,935,981	100%	130,780,980	100%	27,377,125	100%	25,878,500	100%	156,659,480	100%	17.88%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota, propinsi dan pusat	72 SKPD, 30 kali, 6 kali, 100%	347,696,857	5 kali	106,710,880	5 kali	15,438,875	5 kali	15,369,000	5 kali	122,079,880	50%	35.11%
	Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	65 skpd, 30 kali, 5 kali, 100%	169,453,856	6 kali	24,070,100	6 kali	5,671,500	6 kali	5,427,600	6 kali	29,497,700	50%	17.41%
	Revisi RPIJM	Jumlah dokumen RPIJM yang direvisi	4 dokumen	358,785,268	-	-	4 kali	6,266,750	4 kali	5,081,900	4 kali	5,081,900	50%	1.42%
9	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	100%	-	82,99%	155,570,350	85.11%	78,377,010	85.11%	78,015,420	85.11%	233,585,770	85.11%	
	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	283 orang	537,525,903	47 orang	155,570,350	47 orang	78,377,010	47 orang	78,015,420	47 orang	233,585,770	50%	43.46%
10	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	70.00%	6,888,314,992	1	1,702,387,820	55.00%	972,603,138	55.00%	967,718,414	55.00%	2,670,106,234	55.00%	38.76%
		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD			1		95.24%		95.24%		95.24%		95.24%	
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %			1		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah draf dokumen rancangan awal RKPD yang disusun	6 dokumen	1,174,710,657	2 dok	331,021,500	1 dok	252,522,000	1 dok	252,477,100	3 dok	583,498,600	50%	49.67%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPDP	15 hari	1,149,124,649	4 hari	268,612,325	2 hari	66,559,461	2 hari	66,484,125	6 hari	335,096,450	50%	29.16%
	Penetapan RKPDP	Jumlah perwako RKPDP yang diterbitkan	6 perwako	264,450,607	2 Perwako	77,399,555	1 Perwako	25,252,320	1 Perwako	25,051,840	3 Perwako	102,451,395	50%	38.74%
	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi, pengendalian, pelaporan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18 dokumen	288,203,488	4 dok	115,339,438	2 dok	10,552,400	2 dok	10,545,640	6 dok	125,885,078	50%	43.68%
	Perubahan RKPDP	Jumlah perwako perubahan RKPDP yang diterbitkan	6 perwako	1,073,422,284	2 perwako	308,428,085	1 perwako	193,867,242	1 perwako	193,519,020	3 perwako	501,947,105	50%	46.76%
	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	Jumlah usulan kegiatan prioritas kecamatan yang diinvestigasi	30 dokumen	64,720,638	10 dokumen	26,603,200	5 dokumen	3,494,225	5 dokumen	3,477,300	15 dokumen	30,080,500	50%	46.48%
	Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPPD	12 dokumen	1,919,307,669	4 dokumen	574,983,717	2 dokumen	139,813,490	2 dokumen	137,192,389	6 dokumen	712,176,106	50%	37.11%
	Intensifikasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	31 Perangkat Daerah	954,375,000	-	-	31 PD	280,542,000	31 PD	278,971,000	31 PD	278,971,000	50%	29.23%
11	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%	464,860,578	100%	-	100%	15,089,650	100%	14,450,550	100%	7,229,050	100%	1.56%
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	16 kali	238,059,610	-	-	4 kali	7,804,250	4 kali	7,229,050	4 kali	7,229,050	50%	3.04%
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	16 kali	226,800,968			4 kali	7,285,400	4 kali	7,221,500	4 kali		50%	0.00%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
12	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100%	1,145,489,948	100%	208,472,521	100%	45,544,400	100%	43,329,355	100%	251,801,876	100%	21.98%
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	36 kali rapat, 60 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	667,408,200	12 Kali Rapat, 30 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah	208,472,521	6 Kali	16,034,400	6 Kali	14,946,545	18 Kali	223,419,066	50%	33.48%
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LPK2KD yang dibuat	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	324,081,748			4 kali	14,350,000	4 kali	14,145,650	4 kali	14,145,650	50%	4.36%
	Koordinasi penyusunan aksi PUG	- jumlah rapat koordinasi penyusunan aksi PUG	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	77,000,000			4 kali	7,580,000	4 kali	7,560,670	4 kali	7,560,670	50%	9.82%
	Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan aksi SDGS	16 kali rapat; 32 kali rapat/konsultasi luar daerah	77,000,000			4 kali	7,580,000	4 kali	6,676,490	4 kali	6,676,490	50%	8.67%
14	Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	100%	251,674,250	100%	64,408,660	100%	5,313,000	100%	5,240,725	100%	69,649,385	100%	27.67%
	Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) pemerintah daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	24 kali	251,674,250	8 kali	64,408,660	4 kali	5,313,000	4 kali	5,240,725	12 kali	69,649,385	50%	27.67%
4.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2,874,236,853		-		409,274,200		388,375,960		388,375,960		13.51%

RENJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 5 + 7		9 = 8/4 x 100%	
1	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	75.00%	2,874,236,853	-	-	80.00%	409,274,200	80.00%	388,375,960	80.00%	388,375,960	80.00%	13.51%
	Kajian ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan	jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	5 dokumen	981,628,500	-	-	1 dokumen	145,386,500	1 dokumen	139,275,400	1 dokumen	139,275,400	50%	14.19%
	Kajian sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	5 dokumen	895,315,000	-	-	2 dokumen	179,193,000	2 dokumen	179,090,480	2 dokumen	179,090,480	50%	20.00%
	Penguatan inovasi pemerintahan layanan publik	Jumlah rekomendasi kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah	20 rekomendasi	457,227,000	-	-	3 kali	64,329,000	3 kali	49,676,120	3 kali	49,676,120	50%	10.86%
	Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna	Jumlah fasilitas inovasi dan teknologi tepat guna daerah	12 kali fasilitasi	540,066,353	-	-	3 kali fasilitasi	20,365,700	3 kali fasilitasi	20,333,960	3 kali fasilitasi	20,333,960	50%	3.77%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

A. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Bappeda mempunyai tugas ***“Membantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Litbang”***

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang perencanaan dan litbang;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang litbang;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang perencanaan dan bidang litbang;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif;
 - b. Sub Bidang Pengembangan SDA dan Kerjasama;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Makro.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan
6. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

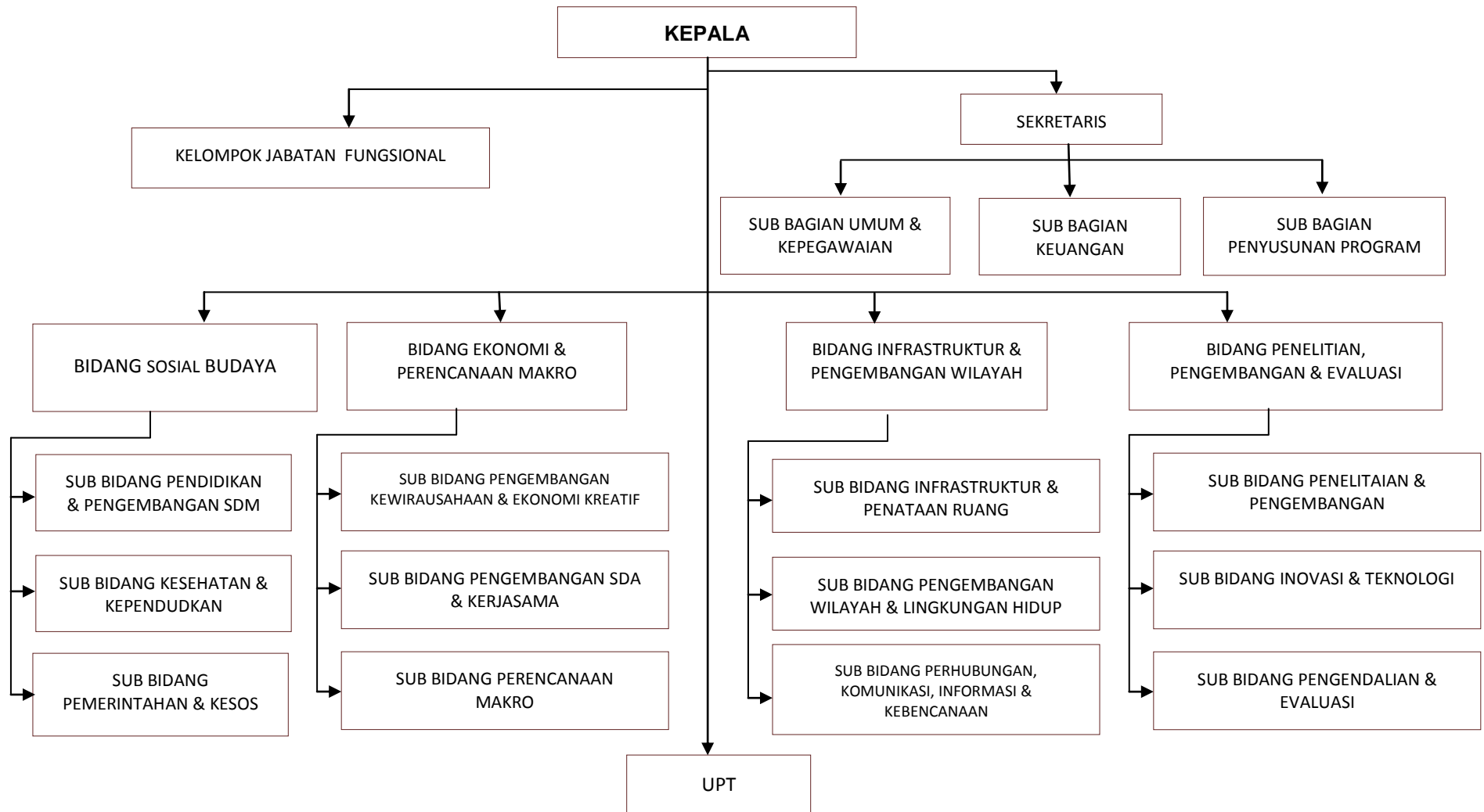
c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk gambaran lebih jelas mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh



Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Bappeda Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Litbang, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang Perencanaan dan Litbang;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang litbang;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang perencanaan dan bidang litbang;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Bappeda mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh sub bagian penyusunan program, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program kerja Badan bidang sosial budaya;
 - b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Bidang Sosial Budaya;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang sosial budaya;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang sosial budaya dibantu oleh Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas- tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro dibantu oleh Sub Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama dan sub bidang Perencanaan Makro.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibantu oleh sub bidang infrastruktur dan penataan ruang, Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan melaksanakan sebagian fungsi Badan Perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan.
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - c. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi dibantu oleh Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, dan sub bidang pengendalian dan evaluasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas teknis Bappeda dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan.

B. Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda

Berdasarkan kewenangannya, Bappeda sebagai lembaga teknis perencana dengan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan mencakup pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi dalam bentuk :

- a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar-daerah, dan antara daerah kota dengan swasta baik dalam dan luar negeri;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - e. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
 - f. Pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis;
 - g. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran di bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi.
3. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi
- Bimbingan, konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan mencakup bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi, berkaitan dengan:
- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - d. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - e. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - f. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
 - g. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis.
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua bidang meliputi :
- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan

Berdasarkan penetapan kinerja Bappeda Kota Payakumbuh mempunyai beberapa indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan Bappeda

No	Indikator (SPM/IKK/IKU)	IKU	IKK	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	√		%	32,00	33,00	34,00	35,00	33,08	33,11	34,00	35,00	
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	√		%	95,21	95,24	97,04	98,20	92,94	95,24	97,04	98,20	
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	√		%	87,78	89,44	91,67	93,39	90,47	89,88	91,67	93,39	
4	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	√		nilai	BB	A	A	A	A	A	A	A	
5	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	√		%	75,00	80,00	85,00	90,00	85,71	90,91	85,00	90,00	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pembangunan daerah sekarang dan kedepannya dengan mengacu pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 disamping memperhatikan kondisi riil daerah dan juga kebutuhan maupun aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Masih rendahnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan bottom-up (bawah-atas);
- Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya kualitas data dan informasi perencanaan;
- Belum optimalnya kualitas SDM aparatur perencana;
- Belum optimalnya konsistensi Bappeda dalam mencapai target kinerja pembangunan;
- Rendahnya Pertumbuhan Inovasi Daerah;
- Masih rendahnya produk kelitbang dalam perumusan dan penatalaksanaan kebijakan daerah;

Tantangan pengembangan pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan yang belum maksimal.
- Meningkatnya kebutuhan untuk menyediakan database informasi pembangunan yang akurat dan mudah diakses.
- Semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi serta kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.
- Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
- Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan Ancaman (*Threats*) pengembangan pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan antara lain :

- Semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi serta kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan dalam perencanaan pembangunan

- Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan
- Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Berdasarkan Permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu - isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Renja Bappeda, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD ditemui perbedaan dengan kebutuhan Renja Bappeda tahun 2021, antara lain adalah kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam, karena Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah kegiatan tersebut terletak di urusan Kesekretariatan Daerah.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Payakumbuh	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	6,413,158,866	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Payakumbuh	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	6,413,158,866	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100%	12,238,400	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100%	12,238,400	
			Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	100%				Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	100%		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang tersusun	4 dokumen	4,488,400	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang tersusun	4 dokumen	4,488,400	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	6 laporan	1,150,000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	6 laporan	1,150,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 kali	6,600,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 kali	6,600,000	
	Administrasi Keuangan	Payakumbuh	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	95%	4,369,978,592	Administrasi Keuangan	Payakumbuh	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	95%	4,369,978,592	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase TLHP yang diselesaikan	100%				Persentase TLHP yang diselesaikan	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayar gaji & tunjangan	41 orang	4,369,978,592	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayar gaji & tunjangan	41 orang	4,369,978,592	
	Administrasi Umum	Payakumbuh	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%	2,012,041,874	Administrasi Umum	Payakumbuh	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%	2,012,041,874	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg	2,387,000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg	2,387,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	79,500,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan	79,500,000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah tenaga penjaga kantor yang dibayarkan	1 orang	31,161,804	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah tenaga penjaga kantor yang dibayarkan	1 orang	31,161,804	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya dan jumlah tenaga sopir yang dibayarkan	24 unit; 1 orang	38,036,804	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya dan jumlah tenaga sopir yang dibayarkan	24 unit; 1 orang	38,036,804	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	14 orang	361,895,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	14 orang	361,895,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	17 jenis, 2 orang	68,188,341	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	17 jenis, 2 orang	68,188,341	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	56 unit	14,702,750	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	56 unit	14,702,750	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 jenis	30,326,100	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 jenis	30,326,100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,713,990	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,713,990	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	5,554,500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	5,554,500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.600 eksemplar; 48 buku	20,493,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.600 eksemplar; 48 buku	20,493,000	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	15,931,000	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	574 porsi; 967 porsi; 63 galon	15,931,000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali; 25 kali	696,802,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali; 25 kali	696,802,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	127,349,585	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	127,349,585	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit gedung	500,000,000	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit gedung	500,000,000	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Payakumbuh	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00%	18,900,000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Payakumbuh	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00%	18,900,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	48 stel	18,900,000	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan		48 stel	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	48 stel	18,900,000
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPJMD	98.20%	922,213,309	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPJMD	98.20%	922,213,309	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%				Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%			
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%				Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Payakumbuh	Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan	58.57%	559,865,659	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Payakumbuh	Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan	58.57%	559,865,659		
			Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistim informasi	66.67%					Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistim informasi	66.67%		
			Persentase kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan SOP	100.00%					Persentase kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan SOP	100.00%		
			Persentase kehadiran peserta musrenbang	87,5%				Persentase kehadiran peserta musrenbang	87,5%			

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase keterisian elemen data dalam SIPD	85,68%				Persentase keterisian elemen data dalam SIPD	85,68%		
			1. Persentase data series pembangunan yang dapat diakses	100.00%				1. Persentase data series pembangunan yang dapat diakses	100.00%		
			2. Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah	100.00%				2. Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah	100.00%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Perubahan RPJMD yang ditetapkan	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Perubahan RPJMD yang ditetapkan	1 Dokumen	2,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	47 orang	216,672,885	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	47 orang	216,672,885	
			Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang RKPD	2 hari				Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang RKPD	2 hari		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Jumah dokumen yang disusun dengan aplikasi SIPP	2 dokumen	143,603,914	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Jumah dokumen yang disusun dengan aplikasi SIPP	2 dokumen	143,603,914	
	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah		Jumlah Perwako Perubahan RKPDP yang diterbitkan	1 perwako	189,067,160	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah		Jumlah Perwako Perubahan RKPDP yang diterbitkan	1 perwako	189,067,160	
	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	2 dokumen	8,521,700	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	2 dokumen	8,521,700	
	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Payakumbuh	Persentase kesesuaian pelaksanaan forum perencanaan dengan time schedule	100.00%	346,899,390	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Payakumbuh	Persentase kesesuaian pelaksanaan forum perencanaan dengan time schedule	100.00%	346,899,390	
			Persentase ketersediaan informasi agenda perencanaan	100.00%				Persentase ketersediaan informasi agenda perencanaan	100.00%		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah		Jumlah draft dokumen rancangan awal RKKPD yang tersusun	1 dokumen	317,697,140	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah		Jumlah draft dokumen rancangan awal RKKPD yang tersusun	1 dokumen	317,697,140	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah		Jumlah Perwako RKKPD yang diterbitkan	1 perwako	29,202,250	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah		Jumlah Perwako RKKPD yang diterbitkan	1 perwako	29,202,250	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Payakumbuh	Persentase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	90%	15,448,260	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Payakumbuh	Persentase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	90%	15,448,260	
Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti			100%	Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti				100%			
Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia			100%	Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia				100%			
Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi			100%	Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi				100%			
	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Dokumen	15,448,260	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Dokumen	15,448,260	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%	36,872,885	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%	36,872,885	
			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%				Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%		
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%				Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%		
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%	6,202,475	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%	6,202,475	
			Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti	100%				Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti	100%		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%				Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	5 kali	6,202,475	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	5 kali	6,202,475	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan terhadap program Renstra minimal 90%	100%	8,560,150	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan terhadap program Renstra minimal 90%	100%	8,560,150	
			Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan yang ditindaklanjuti	100%				Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan	100%		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang ditindaklanjuti			
			Persentase PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%				Persentase PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%		
			Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%				Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%		
			Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%				Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%				Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	8 kali	8,560,150	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	8 kali	8,560,150	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH terhadap program Renstra minimal 90%	100%	22,110,260	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH terhadap program Renstra minimal 90%	100%	22,110,260	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH yang ditindaklanjuti	100%				Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH yang ditindaklanjuti	100%		
			Persentase PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%				Persentase PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota propinsi dan pusat	5 kali	15,438,800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota propinsi dan pusat	5 kali	15,438,800	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tingkat kota propinsi dan pusat	6 kali	6,671,460	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tingkat kota propinsi dan pusat	6 kali	6,671,460	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPJMD	98.20%	23,217,530	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPJMD	98.20%	23,217,530	
			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPd yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%				Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPd yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%		
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%				Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%		
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan sumber daya alam terhadap program Renstra PD minimal 90%	100%	15,932,260	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan sumber daya alam terhadap program Renstra PD minimal 90%	100%	15,932,260	
			Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%				Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PD sub bidang pengembangan sumber daya alam dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100%				Persentase PD sub bidang pengembangan sumber daya alam dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	4 kali	7,804,180	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	4 kali	7,804,180	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang dibuat	- 4 kali - 3 MOU	8,128,080	-	-	-	-	-	Kewenangan urusan Kesekretariatan Daerah
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%	7,285,270	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%	7,285,270	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase hasil koordinasi sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti	100.00%				Persentase hasil koordinasi sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti	100.00%		
			Persentase PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%				Persentase PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	4 kali	7,285,270	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	4 kali	7,285,270	
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%	51,777,210	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Payakumbuh	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%	51,777,210	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%				Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%		
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%				Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%		
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pemerintahan dan kessos terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%	21,347,380	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pemerintahan dan kessos terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%	21,347,380	
			Persentase hasil koordinasi sub bidang pemerintahan dan kessos yang ditindaklanjuti	100.00%				Persentase hasil koordinasi sub bidang pemerintahan dan kessos yang ditindaklanjuti	100.00%		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PD sub bidang pemerintahan dan kessos dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%				Persentase PD sub bidang pemerintahan dan kessos dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali rapat	10,809,400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali rapat	10,809,400	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		1.Jumlah koordinasi dan pelaporan HAM yang dilakukan 2.Jumlah koordinasi dan pelaporan aplikasi pencegahan yang dilakukan	1.4 pelaporan 2.4 pelaporan	10,537,980	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		1.Jumlah koordinasi dan pelaporan HAM yang dilakukan 2.Jumlah koordinasi dan pelaporan aplikasi pencegahan yang dilakukan	1.4 pelaporan 2.4 pelaporan	10,537,980	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid pendidikan dan Pengembangan SDM terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%	16,080,000	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid pendidikan dan Pengembangan SDM terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%	16,080,000	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase hasil koordinasi sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM yang ditindaklanjuti	100.00%				Persentase hasil koordinasi sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM yang ditindaklanjuti	100.00%		
			Persentase PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%				Persentase PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		- Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	4 kali rapat; 1 kali pelaporan	7,580,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		- Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	4 kali rapat; 1 kali pelaporan	7,580,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		- Jumlah Rapat Koordinasi dan pelaporan Aksi PUG	4 kali rapat; 4 kali pelaporan	8,500,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		- Jumlah Rapat Koordinasi dan pelaporan Aksi PUG	4 kali rapat; 4 kali pelaporan	8,500,000	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang kesehatan dan kependudukan terhadap program Renstra PD minimal 90%.	100%	14,349,830	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Payakumbuh	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang kesehatan dan kependudukan terhadap program Renstra PD minimal 90%.	100%	14,349,830	
			Persentase hasil koordinasi sub bidang kesehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti.	100.00%				Persentase hasil koordinasi sub bidang kesehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti.	100.00%		
			Persentase PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%				Persentase PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100.00%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat		- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat	- 3 Kali - 1 Dokumen	14,349,830	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat		- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat	- 3 Kali - 1 Dokumen	14,349,830	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Payakumbuh	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90.00%	978,466,950	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Payakumbuh	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90.00%	978,466,950	
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Payakumbuh	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan	2 rekomen dasi	391,196,950	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Payakumbuh	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan	2 rekomen dasi	391,196,950	
			Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi	2 dokumen				Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi	2 dokumen		
	Penelitian dan pengembangan koperasi, UKM		Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	1 dokumen	315,802,500	Penelitian dan pengembangan koperasi, UKM		Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	1 dokumen	315,802,500	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok	75,394,450	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok	75,394,450	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Payakumbuh	Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah	3 kegiatan	385,389,000	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Payakumbuh	Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah	3 kegiatan	385,389,000	
			Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah	2 rekomendasi				Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah	2 rekomendasi		
			Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu	100%				Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu	100%		
	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan		Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	1 dokumen	385,389,000	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan		Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	1 dokumen	385,389,000	
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Payakumbuh	Jumlah PD yang memiliki inovasi	31 PD	201,881,000	Pengembangan inovasi dan teknologi	Payakumbuh	Jumlah PD yang memiliki inovasi	31 PD	201,881,000	
			Jumlah inovasi daerah terapan yang difasilitasi	7 inovasi				Jumlah inovasi daerah terapan yang difasilitasi	7 inovasi		
			Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah	3 dokumen				Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah	3 dokumen		

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk berinovasi	25 perangkat daerah	52,350,000	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk berinovasi	25 perangkat daerah	52,350,000	
	Ujicoba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah Fasilitas Inovasi dan Teknologi Tepat Guna daerah	3 kali fasilitas	149,531,000	Ujicoba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah Fasilitas Inovasi dan Teknologi Tepat Guna daerah	3 kali fasilitas	149,531,000	
					8,425,706,750					8,417,578,670	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Payakumbuh tidak mempunyai kegiatan yang diusulkan dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan, tetapi memfasilitasi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya melalui aplikasi *e-musrenbang* dan *e-pokir* untuk usulan dari anggota DPRD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2021 mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2021 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Persandingan antara, Kota Prioritas Nasional, Provinsi dengan
Usulan Rencana Kerja Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh	Program/ Kegiatan dalam Renja 2021
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia c. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi		
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan c. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam		

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh	Program/ Kegiatan dalam Renja 2021
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan c. Administrasi Umum d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah b. Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022. Adapun visi Bappeda Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi, Inovatif dan Berkelanjutan”**

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Bappeda kota Payakumbuh tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda;
5. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu membantu Walikota dalam bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, maka tujuan jangka menengah Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat;

Tujuan tersebut dijabarkan melalui beberapa sasaran. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kota Payakumbuh dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi adalah :

1. Meningkatnya perencanaan yang partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
3. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda
5. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Bappeda Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel, Terintegrasi dan Berkelanjutan”**, maka rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2021 terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kota Payakumbuh

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Payakumbuh	A	6,413,158,866			A	6,453,859,223
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	Payakumbuh	100%	12,238,400			100%	16,500,000
		Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik			100%				100%
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang tersusun		4 dokumen	4,488,400	DAU		4 dokumen	16,500,000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun		6 laporan	1,150,000	DAU		6 laporan	1,150,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		6 kali	6,600,000	DAU		6 kali	6,600,000
	Administrasi Keuangan	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	Payakumbuh	95%	4,369,978,592			95%	4,806,976,451
		Persentase TLHP yang diselesaikan			100%				100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji & tunjangan		35 orang	4,369,978,592	DAU		36 orang	4,806,976,451
	Administrasi Umum	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	Payakumbuh	100%	2,012,041,874			100%	1,607,882,772

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar		benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg	2,387,000	DAU		benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg	3,177,097
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan		4 rekening, 12 bulan	79,500,000	DAU		4 rekening, 12 bulan	133,099,995
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah tenaga penjaga kantor yang dibayarkan		1 orang	31,161,804	DAU		1 orang	31,161,804
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya dan jumlah tenaga sopir yang dibayarkan		24 unit; 1 orang	38,036,804	DAU		24 unit; 1 orang	7,154,125
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya		14 orang	361,895,000	DAU		14 orang	615,682,001
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar		17 jenis, 2 orang	68,188,341	DAU		17 jenis, 2 orang	78,007,695
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		56 unit	14,702,750	DAU		56 unit	23,972,641
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		59 jenis	30,326,100	DAU		59 jenis	40,594,435
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid		8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	19,713,990	DAU		8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku	23,984,525
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		2 jenis	5,554,500	DAU		2 jenis	7,453,600

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		3.600 eksemplar; 48 buku	20,493,000	DAU		3.600 eksemplar; 48 buku	28,110,720
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan		574 porsi; 967 porsi; 63 galon	15,931,000	DAU		574 porsi; 967 porsi; 63 galon	21,202,830
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan		40 kali; 25 kali	696,802,000	DAU		40 kali; 25 kali	382,894,094
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan		21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	127,349,585	DAU		21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat	211,387,211
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab		1 unit gedung	500,000,000	DAU		-	-
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Payakumbuh	100.00%	18,900,000			100.00%	22,500,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan		42 stel	18,900,000	DAU		42 stel	22,500,000
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPKD terhadap program RPJMD	Payakumbuh	98.20%	922,213,309			98.80%	1,497,047,287
		Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RPKD yang mengakomodir usulan masyarakat		35.00%				36.00%	
		Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target		93.39%				97.22%	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan	Payakumbuh	80.00%	559,865,659			88.00%	1,222,585,112
		Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistim informasi		75.00%				87.50%	
		Persentase kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan SOP		100.00%				100.00%	
		Persentase kehadiran peserta musrenbang		87.50%				89.58%	
		Persentase keterisian elemen data dalam SIPD		86.67%				90.00%	
		Persentase data series pembangunan yang dapat diakses		100.00%				100.00%	
		Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah		100.00%				100.00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yg dsusun		3 Dokumen	2,000,000	DAU		3 Dokumen	237,875,000
	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang RKPD		2 hari	216,672,885	DAU		1 hari	317,697,140
	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumah dokumen yang disusun dengan aplikasi SIPPD		2 dokumen	143,603,914	DAU		2 dokumen	341,898,387
	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		47 orang	189,067,160	DAU		47 orang	208,415,567

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun		1 dokumen	8,521,700	DAU		1 dokumen	116,699,019
	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pelaksanaan forum perencanaan dengan time schedule	Payakumbuh	100.00%	346,899,390			100.00%	263,909,775
		Persentase ketersediaan informasi agenda perencanaan		100.00%				100.00%	
	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPD yang tersusun		1 dokumen	317,697,140	DAU		1 dokumen	225,041,487
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah		6 kali	29,202,250	DAU		6 kali	38,868,288
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	Payakumbuh	90%	15,448,260			90%	10,552,400
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia		100%				100%	
		Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi		100%				100%	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		3 Dokumen	15,448,260	DAU		3 Dokumen	10,552,400

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Payakumbuh	98.20%	36,872,885			98.80%	37,472,350
		Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat		35.00%				36.00%	
		Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target		93.39%				97.22%	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	Payakumbuh	100%	6,202,475			100%	6,202,000
		Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase PD Sub. Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%		100%				100%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat		5 kali	6,202,475	DAU		5 kali	6,202,000
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan terhadap program Renstra minimal 90%	Payakumbuh	100%	8,560,150			100%	8,760,150

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%		100%				100%	
		Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%		100%				100%	
		Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%		100%				100%	
		Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub. Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan terhadap program Renstra minimal 90%		100%				100%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat		8 kali	8,560,150	DAU		8 kali	8,760,150
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH terhadap program Renstra minimal 90%	Payakumbuh	100%	22,110,260			100%	22,510,200

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%		100%				100%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota propinsi dan pusat		5 kali	15,438,800	DAU		5 kali	15,638,800
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tingkat kota propinsi dan pusat		6 kali	6,671,460	DAU		6 kali	6,871,400
4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Payakumbuh	98.20%	15.009.450			98.80%	15.009.450
		Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat		35.00%				36.00%	
		Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target		93.39%				97.22%	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan sumber daya alam terhadap program Renstra PD minimal 90%	Payakumbuh	100%	7,804,180			100%	7,804,180

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan sumber daya alam yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase PD sub bidang pengembangan sumber daya alam dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%		100%				100%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA		4 kali	7,804,180	DAU		4 kali	7,804,180
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif terhadap program Renstra PD minimal 90%	Payakumbuh	100.00%	7,285,270			100.00%	7,285,270
		Persentase hasil koordinasi sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti		100.00%				100.00%	
		Persentase PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%		100.00%				100.00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif		4 kali	7,285,270	DAU		4 kali	7,285,270
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPJMD	Payakumbuh	98.20%	51,777,210			98.80%	313,747,104

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat		35.00%				36.00%	
		Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target		93.39%				97.22%	
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pemerintahan dan kessos terhadap program Renstra PD minimal 90%	Payakumbuh	100.00%	21,347,380			100.00%	173,100,000
		Persentase hasil koordinasi sub bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		100.00%				100.00%	
		Persentase PD sub bidang pemerintahan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%		100.00%				100.00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		6 kali rapat	10,809,400	DAU		6 kali rapat	133,100,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1.Jumlah koordinasi dan pelaporan HAM yang dilakukan 2.Jumlah koordinasi dan pelaporan aplikasi pencegahan yang dilakukan		1.4 pelaporan 2.4 pelaporan	10,537,980	DAU		1.4 pelaporan 2.4 pelaporan	40,000,000
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid pendidikan dan Pengembangan SDM terhadap program Renstra PD minimal 90%	Payakumbuh	100.00%	16,080,000			100.00%	44,000,000

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase hasil koordinasi sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM yang ditindaklanjuti		100.00%				100.00%	
		Persentase PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%		100.00%				100.00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S		4 kali rapat; 1 kali pelaporan	7,580,000	DAU		4 kali rapat; 1 kali pelaporan	22,000,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah Rapat Koordinasi dan pelaporan Aksi PUG		4 kali rapat; 4 kali pelaporan	8,500,000	DAU		4 kali rapat; 4 kali pelaporan	22,000,000
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang kesehatan dan kependudukan terhadap program Renstra PD minimal 90%.	Payakumbuh	100%	14,349,830			100%	96,647,104
		Persentase hasil koordinasi sub bidang kesehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti.		100.00%				100.00%	
		Persentase PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%		100.00%				100.00%	

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat		- 3 Kali - 1 Dokumen	14,349,830	DAU		- 3 Kali - 1 Dokumen	96,647,104
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	Payakumbuh	90.00%	978,466,950			90.00%	844,463,325
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan	Payakumbuh	2 rekomendasi	391,196,950			2 rekomendasi	356,463,325
		Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi		2 dokumen				2 dokumen	
	Penelitian dan pengembangan koperasi, UKM	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun		1 dokumen	315,802,500	DAU		1 dokumen	250,000,000
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh		1 Dok	75,394,450	DAU		1 Dok	106,463,325
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah	Payakumbuh	3 kegiatan	385,389,000			3 kegiatan	230,000,000
		Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah		2 rekomendasi				2 rekomendasi	
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu		100%				100%	
	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun		1 dokumen	385,389,000	DAU		1 dokumen	230,000,000

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah PD yang memiliki inovasi	Payakumbuh	31 PD	201,881,000			31 PD	258,000,000
		Jumlah inovasi daerah terapan yang difasilitasi		7 inovasi				7 inovasi	
		Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah		3 dokumen				3 dokumen	
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk berinovasi		25 perangkat daerah	52,350,000	DAU		25 perangkat daerah	148,000,000
	Ujicoba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Fasilitas Inovasi dan Teknologi Tepat Guna daerah		3 kali fasilitas	149,531,000	DAU		3 kali fasilitas	110,000,000
TOTAL					8.417.578.670				9.146.589.289

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2021

Rencana Kerja Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2021 terdiri dari beberapa Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda Tahun 2021. Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021 berdasarkan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 diuraikan dalam Tabel 4.1 dan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021 berdasarkan Hasil Pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021
Bappeda Kota Payakumbuh
(Program dan Kegiatan Sesuai Renstra)

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	2,978,624,519	4,538,497,496
4.00.02.	PERENCANAAN								2,476,990,109	3,800,497,496
0.00.4.00.4.00.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A			Nilai IKM	86.00	1,108,819,309	1,434,762,821
0.00.4.00.4.00.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg			2,387,000	2,745,050
0.00.4.00.4.00.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan			79,500,000	133,099,995
0.00.4.00.4.00.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan				Jumlah kendaraan dinas yang	24 unit			6,875,000	7,154,125

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	kendaraan dinas/operasional				dibayar pajaknya						
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	14 orang			339,672,000	615,682,001	
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	17 jenis, 2 orang			68,188,341	78,007,695	
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	56 unit			11,695,500	23,972,641	
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 jenis			17,078,100	40,594,435	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku			11,522,195	23,984,525
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis			5,554,500	7,453,600
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah peralatan kerja yang diadakan	1 unit			2,000,000	35,000,000
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.600 eksemplar; 48 buku			20,493,000	28,110,720
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	574 porsi; 967 porsi; 63 galon			15,931,000	21,202,830
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	40 kali; 25 kali			457,760,869	382,894,094

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					yang dilaksanakan					
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 1.19	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran				Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	2 orang			70,161,804	34,861,110
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A			Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80.00%	329,349,585	211,387,211
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 2.21	Pengadaan kendaraan dinas /operasional				Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1 unit kendaraan roda 4			1,000,000	45,000,000
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 2.25	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang diadakan	1 unit			1,000,000	45,000,000
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat			127,349,585	211,387,211

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 2.38	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				Jumlah gedung kantor yang direhab	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda empat			200,000,000	211,387,211
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A			Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00%	18,900,000	22,500,000
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	42 stel			18,900,000	22,500,000
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	12,238,400	16,500,000
0.00.4.00.4 .00.02.01.0 6.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik				Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan public yang	4 dokumen			12,238,400	16,500,000

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					tersusun						
4.00.06.4.0 0.02.01.15.	Program Pengembangan data/informasi		Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	98.20%			Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah	90.00%	88,416,150	273,181,137	
4.00.06.4.0 0.02.01.15. 08	Penyusunan informasi pembangunan daerah				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	1 dokumen			8,521,700	116,699,019	
4.00.06.4.0 0.02.01.15. 10	Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)				Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok			75,394,450	106,463,325	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.00.06.4.0 0.02.01.15. 26	Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK				Jumlah Bidang DAK yang diusulkan	10 bidang				4,500,000	50,018,794
4.00.02.4.0 0.02.01.28.	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%				Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	90.00%	0	0
4.00.02.4.0 0.02.01.28. 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah				- Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan - Jumlah MOU yang dibuat	- 4 kali - 3 MOU				0	0
4.00.02.4.0 0.02.01.30.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program	98.20%				Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan	100.00%	14,762,625	14,962,150

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RPJMD					yang baik, konsisten dan selaras		
4.00.02.4.0 0.02.01.30.02	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	5 kali			6,202,475	6,202,000
4.00.02.4.0 0.02.01.30.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah				Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota,	8 kali			8,560,150	8,760,150

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					propinsi dan pusat						
4.00.02.4.0 0.02.01.31.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	100.00%	16,438,800	22,510,200	
4.00.02.4.0 0.02.01.31. 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan				jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota propinsi dan pusat	5 kali			15,438,800	15,638,800	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.02.4.0 0.02.01.31. 12	Koordinasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh				jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tingkat kota propinsi dan pusat	6 kali			1,000,000	6,871,400
4.00.02.4.0 0.02.01.31. 13	Revisi RPIJM				Jumlah dokumen RPIJM yang direvisi	1 dokumen		0	0	
4.00.02.4.0 0.02.01.32.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%			Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	85.11%	106,577,005	108,577,005
4.00.02.4.0 0.02.01.32. 04	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator				Jumlah Peserta Sosialisasi	47 orang		106,577,005	108,577,005	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	perencana				Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah						
4.00.02.4.0 0.02.01.16.	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%	737,585,965	1,265,250,112	
			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodi usulan masyarakat	35.00%			Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	65.00%			
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%			Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	100.00%			

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 08	Penyusunan rancangan RKPД				Jumlah draft dokumen rancangan awal RKKPD yang tersusun	1 dokumen			294,736,250	225,041,487
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPД				Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang RKPД	2 hari			75,193,380	202,598,984
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 10	Penetapan RKPД				Jumlah Perwako RKPД yang diterbitkan	1 perwako			20,566,140	38,868,288
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah				Jumlah Dokumen Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen			15,448,260	10,552,400
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 18	Perubahan RKPД				Jumlah Perwako Perubahan RKPД yang diterbitkan	1 perwako			189,067,160	208,415,567

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 22	Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumah dokumen yang disusun dengan aplikasi SIPP	2 dokumen			140,574,775	341,898,387
4.00.02.4.0 0.02.01.16. 32	Penetapan Perubahan RPJMD				Jumlah Perda Perubahan RPJMD yang disusun	1 Perda			2,000,000	237,875,000
4.00.02.4.0 0.02.01.34.	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase konsistensi program RKP D terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%	11,913,040	117,119,757
4.00.02.4.0 0.02.01.34. 09	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA				Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	4 kali			5,428,860	60,066,843

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.02.4.0 0.02.01.34. 10	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif				Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	4 kali			6,484,180	57,052,914
4.00.02.4.0 0.02.01.35.	Program perencanaan sosial budaya		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase PD lingkup bidang sosial dan budaya yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%	30,989,230	273,747,104
4.00.02.4.0 0.02.01.35. 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali rapat			10,809,400	133,100,000
4.00.02.4.0 0.02.01.35. 05	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)				- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah	- 3 Kali - 1 Dokumen			11,599,830	96,647,104

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Dokumen LP2KD yang dibuat						
4.00.02.4.0 0.02.01.35. 06	Koordinasi Penyusunan Aksi PUG				- Jumlah Rapat Koordinasi dan pelaporan Aksi PUG	4 kali rapat; 4 kali pelaporan			1,000,000	22,000,000	
4.00.02.4.0 0.02.01.35. 07	Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S				- Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	4 kali rapat; 1 kali pelaporan			7,580,000	22,000,000	
4.00.02.4.0 0.02.01.45.	Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A			Persentase Rencana Aksi PPK dengan Kategori Minimal Baik (Hijau)	100%	1,000,000	40,000,000	
4.00.02.4.0 0.02.01.45. 01.	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah				1.Jumlah koordinasi dan pelaporan HAM yang dilakukan 2.Jumlah koordinasi dan pelaporan aplikasi	1.4 pelaporan 2.4 pelaporan			1,000,000	40,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					pencegahan yang dilakukan						
4.00.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								<u>501,634,410</u>	<u>738,000,000</u>	
4.00.06.4.0 0.02.01.29.	Program pengembangan inovasi daerah		Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90.00%			Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)	90.00%	501,634,410	738,000,000	

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.00.06.4.0 0.02.01.29. 29.	Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan				Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	1 dokumen			197,105,550	250,000,000
4.00.06.4.0 0.02.01.29. 30.	Kajian Sosial Dan Pemerintahan				Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	1 dokumen			86,388,780	230,000,000
4.00.06.4.0 0.02.01.29. 35.	Penguatan Inovasi Pemerintahan Dan Layanan Publik				2. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk berinovasi	25 perangkat daerah			101,000,000	148,000,000
4.00.06.4.0 0.02.01.29. 36.	Pengembangan Karya Inovasi Dan Teknologi Tepat				Jumlah Fasilitas Inovasi dan Teknologi	3 kali fasilitas			117,140,080	110,000,000

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Guna				Tepat Guna daerah						
TOTAL									<u>2,978,624,519</u>	<u>4,538,497,496</u>	

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021
Bappeda Kota Payakumbuh
(Program/Kegiatan Hasil Pemetaan Sesuai Permendagri No.90 Tahun 2020)

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)						
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12			
	BAPPEDA									7,143,853,405	9,330,924,089		
5	01	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A					5,634,536,180	6,644,721,173
								Persentase sasaran, progam dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	86,36 %				
								Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	100.00 %				
								Nilai IKM	86,00				
								Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan	44.12%				
								Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A				
								Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80.00%				
								Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00 %				
								Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 orang				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)				Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
						Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
						Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1				2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
5	01	0 1	2.0 1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100%			12,238,400	12,238,400
								Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	100%				
5	01	0 1	2.0 1	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan publik yang tersusun	4 dokumen			4,307,900	4,307,900
5	01	0 1	2.0 1	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	6 laporan			3,530,500	3,530,500
5	01	0 1	2.0 1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 kali			4,400,000	4,400,000
5	01	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan			Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	95%			4,165,228,886	5,000,000,000
								Persentase TLHP yang diselesaikan	100%				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
5	01	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah ASN yang dibayar gaji & tunjangan	34 orang			4.165.228.886	5,000,000,000
5	01	0 1	2.0 3		Administrasi Umum				Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%			1,438,168,894	1,609,982,773
								Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%					
5	01	0 1	2.0 3	01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 300 lembar, cek giro 10 buku, paket pengiriman 15 kg			2,387,000	3,177,097
5	01	0 1	2.0 3	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	4 rekening, 12 bulan			79,500,000	133,099,995
5	01	0 1	2.0 3	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS				Persentase ASN yang dibayarkan jaminan pemeliharaan kesehatan	100%			1,000,000	100,000
5	01	0 1	2.0 3	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				Jumlah tenaga penjaga kantor yang dibayarkan	1 orang			31,161,804	31,161,804

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)		
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
5	01	01	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya dan jumlah tenaga sopir yang dibayarkan	24 unit; 1 orang			45,875,000	7,154,125
5	01	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	32 orang			339,672,000	615,682,001
5	01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor					Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	17 jenis, 2 orang			68,188,341	78,007,695
5	01	01	2.03	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	56 unit			11,695,500	23,972,641
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Jumlah jenis ATK yang disediakan	59 jenis			17,078,100	40,594,435
5	01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	8 jenis, 50.000 lembar, 200 buku			11,522,195	23,984,525

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
5	01	0 1	2.0 3	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis			5,554,500	7,453,600
5	01	0 1	2.0 3	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit			1,000,000	1,000,000
5	01	0 1	2.0 3	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3.600 eksemplar; 48 buku			20,493,000	28,110,720
5	01	0 1	2.0 3	17	Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	574 porsi; 967 porsi; 63 galon			15,931,000	21,202,830
5	01	0 1	2.0 3	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali; 25 kali			457,760,869	382,894,094
5	01	0 1	2.0 3	20	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit			1,000,000	0
5	01	0 1	2.0 3	25	Pengadaan Mebeleur				Jumlah mebeleur yang diadakan	1 unit			1,000,000	1,000,000
5	01	0 1	2.0 3	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	21 unit kendaraan roda dua; 4 unit kendaraan roda			127,349,585	211,387,211

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12		
						empat						
5	01	0	2.0	38	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit gedung		200,000,000	-
5	01	0	2.0		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya			Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100.00%		18,900,000	22,500,000
5	01	0	2.0	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	48 stel		18,900,000	22,500,000
5	01	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%			
								Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomod ir usulan masyarakat	35.00%			
								Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%			
								Persentase konsistensi program pada Renja Perangkat Daerah dengan program pada Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi	91.78%		852,684,670	1,490,520,137
								Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota	89.25%			
								Persentase Usulan Masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	86,36%			

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)		
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
												Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	96.23%		
												Tingkat aksesibilitas data	100.00 %		
												Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	90.00%		
												Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	96,05%		
												Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	93.62		
												Persentase konsistensi program RKPd terhadap program RPJMD	98.20		
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan	58.57%				542,500,160	1,216,063,962
									Persentase tahapan perencanaan yang telah menerapkan sistim informasi	66.67%					

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12		
						Persentase kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan SOP	100.00%					
						Persentase kehadiran peserta musrenbang	87,5%					
						Persentase keterisian elemen data dalam SIPD	85,68%					
						Persentase data series pembangunan yang dapat diakses	100.00%					
						Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah	100.00%					
5	01	0 2	2.0 1	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	3 Dokumen		211,633,300	237,875,000

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang RKPD	2 hari			75,193,380	311,175,989
5	01	02	2.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya				Jumah dokumen yang disusun dengan aplikasi SIPPD	2 dokumen			140,574,775	341,898,387
5	01	02	2.01	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah				Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	47 orang			106,577,005	208,415,567
5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang disusun	1 dokumen			8,521,700	116,699,019
5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah				Persentase kesesuaian pelaksanaan forum perencanaan dengan time schedule	100.00%			294,736,250	263,903,775
									Persentase ketersediaan informasi agenda perencanaan	100.00%				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
5	01	0 2	2.0 2	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah				Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPD yang tersusun	1 dokumen			272,736,250	225,041,487
									Jumlah Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	6 kali				
5	01	0 2	2.0 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	6 kali			22,000,000	38,862,288
5	01	0 2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				Persentase PD dengan rata- rata pencapaian kinerja program/kegiat an minimal 90%	90%			15,448,260	10,552,400
									Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100%				
									Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia	100%				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022				
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)							
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12				
						Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi	100%							
5	01 02 2.0 3	04				Jumlah Dokumen Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Dokumen			15,448,260	10,552,400			
5	01 03				PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	4	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat bidang sosial budaya	3.50%	31,989,230	313,747,104
						Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%				Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD terkait bidang sosial budaya	43.90%		
						Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%				Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai atau melebihi target terkait bidang sosial budaya	44.27%		

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
								Persentase konsistensi program pada Renja PD dengan program pada renstra PD lingkup bidang sosial budaya	100%		
								Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang sosial budaya dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota.	100%		
								Persentase PD lingkup bidang sosial dan budaya yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%		
								Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	100%		
5	01	0	2.0					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan			
		4	1					Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pemerintahan	100.00%		
										11,809,400	173,100,000

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
									Pemerintahan yang dilaksanakan					
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan				1.Jumlah koordinasi dan pelaporan HAM yang dilakukan 2.Jumlah koordinasi dan pelaporan aplikasi pencegahan korupsi yang dilakukan	1.3 pelaporan 2.3 pelaporan			1,000,000	40,000,000
5	01	04	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia				Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid pendidikan dan Pengembangan SDM terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%			8,580,000	44,000,000
									Persentase hasil koordinasi sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM yang ditindaklanjuti	100.00%				
									Persentase PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan	100.00%				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
					SDM dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%						
					Persentase PD lingkup subbidang Pembangunan Manusia yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%					
5	01 04 2.0 2	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia (Jumlah Rapat Koordinasi dan pelaporan Aksi PUG)	4 kali rapat; 1 kali pelaporan		7,580,000	22,000,000
5	01 04 2.0 2	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan	4 kali rapat;		1,000,000	22,000,000

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
									Manusia					
5	01	04	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat				Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang kehatan dan kependudukan terhadap program program Renstra PD minimal 90%.	100%			11,599,830	96,647,104
									Persentase hasil koordinasi sub bidang kehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti.	100.00%				
									Persentase PD sub bidang kehatan dan kependudukan dengan rata- rata pencapaian kinerja program/kegiat an minimal 90%	100.00%				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022				
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)							
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target						
1			2			3	5	6	7	8	9	10	12	12
									Persentase PD lingkup subbidang Kesejahteraan Masyarakat yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%				
5	01	0 4	2.0 3	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat				- Jumlah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Dokumen LP2KD yang dibuat	- 3 Kali - 1 Dokumen	Persentase hasil koordinasi sub bidang kehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti.	100.00 %	11,599,830	96,647,104
5	01	0 4			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	4	Persentase konsistensi program RKPJMD terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPJMD terkait bidang ekonomi yang mengakomodir usulan masyarakat	7%	11,913,040	0
							Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPJMD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%			Persentase konsistensi Program RKPJMD terkait bidang ekonomi terhadap Program RPJMD	27.73%		

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
			Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%				Persentase Indikator RPJMD terkait bidang ekonomi yang Tercapai atau melebihi target	27.53%		
								Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00 %		
5	01	0	2.0		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif			Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif terhadap program Renstra PD minimal 90%	100.00%		
		4	2					Persentase hasil koordinasi sub bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti	100.00%		
								Persentase PD sub bidang	100.00%	5,428,860	0

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12		
						Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiat an minimal 90%						
						Persentase PD lingkup subbidang Ekonomi Kreatif yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%					
5	01	0 4	2.0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Bidang Ekonomi Kreatif			Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	4 kali		5,428,860	0
5	01	0 4	2.0 3		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam			Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan sumber daya alam terhadap program Renstra PD minimal 90%	100%		6,484,180	0

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
						Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%				
						Persentase PD sub bidang pengembangan sumber daya alam dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%	100%				
						Persentase PD lingkup subbidang Sumber Daya Alam yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%				
5	01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam						
						Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	4 kali			6,484,180	0

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)					
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12		
5	01	05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	4	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98.20%			Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD terkait Bidang IPW yang mengakomodir usulan masyarakat	24.50%	31,201,425	37,472,350
					Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	35.00%			Persentase konsistensi program RKPD terkait Bidang IPW terhadap program RPJMD	26.57%		
					Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	93.39%			Persentase indikator RPJMD terkait Bidang IPW yang tercapai atau melebihi target	21.59%		
									Persentase konsistensi program pada Renja Perangkat Daerah dengan Program Pada Renstra PD lingkup Bidang IPW	90%		
									Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang IPW dengan Provinsi, Nasional, Kab/Kota wilayah perbatasan	80%		
									Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah	100%		

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
								Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah			
								Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100%		
								Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	100%		
5	01	05	2.01					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			
								Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH terhadap program Renstra minimal 90%	100%	16,438,800	22,510,200
								Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH yang ditindaklanjuti	100%		

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022					
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)								
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12					
						Persentase PD Sub.Bidang Pengembangan Wilayah & LH dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%								
						Persentase PD lingkup subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%								
5	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup					jumlah rapat-rapat koordinasi pengentasan masalah air minum dan sanitasi tingkat kota propinsi dan pusat	4 kali			15,438,800	15,638,800
5	01	05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup					jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi penataan, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh tingkat	4 kali			1,000,000	6,871,400

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
									kota propinsi dan pusat					
5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan				Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan terhadap program Renstra minimal 90%	100%			8,560,150	8,760,150
									Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan yang ditindaklanjuti	100%				
									Persentase PD Sub.Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%				
									Persentase PD dengan konsistensi	100%				

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
					program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%						
					Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%					
					Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra minimal 90%	100%					

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
						Persentase PD lingkup subbidang Kebinaamargaan dan Perhubungan yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%				
5	01 0 5	2.0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan			Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	3 kali		8,560,150	8,760,150
5	01 0 5	2.0 3		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan			Persentase PD dengan konsistensi program renja PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program	100%		6,202,475	6,202,000

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)				
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
						Renstra minimal 90%					
						Persentase hasil koordinasi Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti	100%				
						Persentase PD Sub.Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja program/ minimal 90%	100%				
						Persentase PD lingkup subbidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan yang telah memiliki dokumen peencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100.00%				
5	01	0	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						
		5	3			Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi Pemanfaatan	4 kali			6,202,475	6,202,000

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022				
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)							
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	12				
	Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan				Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat									
5	05	0 2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90.00%			Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90%	581,528,860	844,463,325
											Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%		
											Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	2 dokum en		
											Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%		
5	05	0 2	2.0 1		Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peraturan					Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah	3 usulan		1,000,000	0

KODE / REKENING (sesuai e-planning)					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022			
							Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)		
							Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target	
1					2	3	5	6	7	8	9	10	12	12	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum					Jumlah Fasilitasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum yang dilaksanakan	3 kali fasilitasi			1,000,000	0
5	05	02	2.02		Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan					Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah	3 kegiatan			85,388,780	230,000,000
										Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah	2 rekomendasi				
										Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu	100%				
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan					Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disusun	1 dokumen			85,388,780	230,000,000

KODE / REKENING (sesuai e-planning)				Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022		
						Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)				Hasil (Outcome)	
						Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target			Tolok ukur	Target
1				2	3	5	6	7	8	9	10	12	12
5	05	0	2.0		Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan			Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan	2 rekomendasi			227,000,000	356,463,325
		2	3				Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi	2 dokumen					
5	05	0	2.0	01	Penelitian dan pengembangan koperasi, UKM			Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kewilayahan yang disusun	1 dokumen			101,000,000	250,000,000
5	05	0	2.0	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Jumlah dokumen indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh	1 Dok			176,000,000	106,463,325
5	05	0	2.0		Pengembangan inovasi dan teknologi			Jumlah PD yang memiliki inovasi	31 PD			218,140,080	258,000,000
		2	4				Jumlah inovasi daerah terapan yang difasilitasi	7 inovasi					
							Jumlah dokumen data	3 dokumen					

KODE / REKENING (sesuai e-planning)	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022						
			Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)									
			Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target	Tolok ukur	Target								
1			2			3			5	6	7	8	9	10	12	12
5	05	02	2.04	01	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi					pendukung inovasi daerah						
										Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi untuk berinovasi	25 perangkat daerah				101,000,000	148,000,000
5	05	02	2.01	02	Ujicoba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi					Jumlah Fasilitasi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna daerah	3 kali fasilitasi				117,140,080	110,000,000
TOTAL														7,143,853,405	9,330,924,089	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2021 ini merupakan perencanaan yang berkesinambungan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2017 – 2022 yang dituangkan dalam perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Renja Bappeda Tahun 2021 merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Payakumbuh dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Bappeda, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renja mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur Bappeda Kota Payakumbuh.

Dokumen Rencana Kerja ini juga merupakan dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di Bappeda Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Agustus 2020

KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

The image shows a circular official stamp of the Bappeda Kota Payakumbuh. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA' at the top, 'BAPPEDA' in the center, and 'PAYAKUMBUH' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si

NIP. 19751005 199501 1 001

**INVENTARISASI, IDENTIFIKASI SERTA PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
RPJMD : TAHUN 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019							CATATAN	
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI					PROGRAM.	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5					6	7		8
				urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg				
PERENCANAAN				5	01							
	1.01.01.01.1.1.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan jasa surat menyurat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	01	01	2.03	02		Administrasi Umum	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	5	01	01	2.03	06		Administrasi Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	5	01	01	2.03	07		Administrasi Umum	Penyediaan jasa administrasi keuangan	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	5	01	01	2.03	08		Administrasi Umum	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5	01	01	2.03	09		Administrasi Umum	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	01	01	2.03	10		Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	01	01	2.03	11		Administrasi Umum	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	01	01	2.03	12		Administrasi Umum	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	01	01	2.03	13		Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5	01	01	2.03	15		Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
			Penyediaan makanan dan minuman	5	01	01	2.03	17		Administrasi Umum	Penyediaan makanan dan minuman	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	01	01	2.03	18		Administrasi Umum	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019								CATATAN
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI					PROGRAM.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5					6	7	8	
			Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	5	01	01	2.03	05		Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	5	01	01	2.03	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	
			Pengadaan mebeleur	5	01	01	2.03	25		Administrasi Umum	Pengadaan mebeleur	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	01	01	2.03	28		Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
			Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	5	01	01	2.03	22		Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	
			Rehab sedang/berat gedung kantor	5	01	01	2.03	38		Administrasi Umum	Rehab sedang/berat rumah gedung kantor	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	5	01	01	2.03	30		Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5	01	01	2.04	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	01	01	2.04	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	01	01	2.01	05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	5	01	01	2.01	01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
				5	01	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
				5	01	01	2.01	03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
				5	01	01	2.01	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
				5	01	01	2.01	05			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Program Pengembangan data/informasi	Penyusunan informasi pembangunan daerah	5	01	02	2.01	07	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019				CATATAN				
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI					PROGRAM.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5				6	7	8		
				5	01	02	2.01	08			Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	
				5	01	02	2.01	09			Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	5	05	02	2.03	04	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Kegiatan Koordinasi, Rekapitulasi Dan Konsolidasi Data Teknis Dan Rencana Kegiatan Usulan DAK	5	01	02	2.02	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan pendanaan pembangunan Daerah	Koordinasi dan sinronisasi kebijakan penganggaran di daerah	
		Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	4	01	02	2.04	01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kewenangan Sekretariat Daerah
								02			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
								03			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	5	01	05	2.03	01	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	
				5	01	05	2.03	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	
				5	01	05	2.03	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	5	01	05	2.02	01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	
				5	01	05	2.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019				CATATAN			
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI			PROGRAM.		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5			6	7	8		
				5	01	05	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	5	01	05	2.01	01	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi penataan dan pencegahan kawasan kumuh	5	01	05	2.01	02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
				5	01	05	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencana	5	01	02	2.01	06	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Identifikasi permasalahan pembangunan daerah
		Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPd	5	01	02	2.02	01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
				5	01	02	2.01	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penggangan di daerah
				5	01	02	2.01	06			Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
			Penyelenggaraan musrenbang RKPd	5	01	02	2.01	03		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
			Penetapan RKPd	5	01	02	2.01	01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019				CATATAN				
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI					PROGRAM.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5					6	7	8	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	5	01	02	2.03	01		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
				5	01	02	2.03	02			Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	
				5	01	02	2.03	03			Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	
				5	01	02	2.03	04			Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	
			Perubahan RKPD	5	01	02	2.01	01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	
			Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5	01	02	2.01	05		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	
				5	01	02	2.01	08			Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	
			Intensifikasi SAKIP	4	01	04	2.02	03	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kewenangan Sekretariat Daerah
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDA	5	01	04	2.03	01	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
				5	01	04	2.03	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
				5	01	04	2.03	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	5	01	04	2.01	01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
				5	01	04	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019				CATATAN			
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI			PROGRAM.		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5			6		7	8	
				5	01	04	2.01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
				5	01	04	2.02	01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
				5	01	04	2.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
				5	01	04	2.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
		Program perencanaan sosial budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	5	01	04	2.01	01	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
				5	01	04	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
				5	01	04	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
				5	01	04	2.02	01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
				5	01	04	2.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
				5	01	04	2.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019				CATATAN				
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI					PROGRAM.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5				6	7	8		
				5	01	04	2.03	01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
				5	01	04	2.03	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
				5	01	04	2.03	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
			Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	5	01	04	2.03	03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
			Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	5	01	02	2.03	01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
				5	01	02	2.03	02			Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	
				5	01	02	2.03	03			Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	
				5	01	02	2.03	04			Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	
		Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	5	01	04	2.01	01	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
				5	01	04	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
				5	01	04	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA TAHUN KE 3 (TAHUN 2021)				PERMENDAGRI 90/2019				CATATAN				
URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	KODEFIKASI (Diisi dari e-Planning))	PROGRAM (Diisi dari RPJMD)	Kegiatan	KODEFIKASI			PROGRAM.		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5			6	7	8			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	Kajian ekonomi daerah dan kewilayahan	5	05	02	2.03	01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan pengembangan koperasi, UKM	
				5	05	02	2.03	02			Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	
				Kajian sosial dan pemerintahan	5	05	02	2.02	03		Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan
					5	05	02	2.01	02		Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidng pemerintahan umum
					5	05	02	2.02	13			Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan
					5	05	02	2.01	14			Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan.
				Penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik	5	05	02	2.01	03		Pengembangan inovasi dan teknologi	Diseminasi jenis, prosedur dan metoda penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif
				Pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna	5	05	02	2.01	01			Penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi
				5	05	02	2.01	02			Ujicoba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	

KEMENTERIAN KOTA PAYAKUMBUH



Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si
NIP. 19751005 199501 1001